

Abstrak

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, cita – cita seperti inilah harapan masa depan semua negara.

Khusus Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak berusaha untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak, hal tersebut merupakan prioritas yang harus dilakukan, jika ingin dimasa yang akan datang lebih baik. Dalam mewujudkan perlindungan anak yang maksimal diperlukan adanya sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya mencukupi. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kementerian Sosial RI sejak tahun 2010 merekrut pekerja sosial sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan julukan *Satuan Bhakti Pekerja Sosial* disingkat Sakti Peksos

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila, selanjutnya di rekonstruksi menjadi hukum berbasis nilai keadilan pancasila.

Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dengan negara lain, dengan cara mengkaji dan menganalisa perundang-undangan,jurnal, kasus, data dan menyebar angket serta wawancara langsung.

Hasil penelitian, menemukan bahwa pelaksanaan kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan pancasila yakni; (1)kedudukan pekerja sosial sebagai pegawai Kementerian Sosial RI yang ditempatkan di Dinas Sosial Kab/Kota, dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial RI, (2)analisa kebutuhan yang tercantum dalam kontruksi hukum tersebut belum dilakukan, (3)dalam perekrutan menerima dari berbagai latar belakang pendidikan/jurusan dengan tidak ada pelatihan sebelum ditugaskan di masyarakat.

Kelemahan yang ditemukan dalam kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan pancasila, yakni (1) Perspektif struktur hukum, yakni kedudukan Satuan Bhakti Pekerja Sosial menyebabkan rentang kendali pembinaan dan pengendalian yang kurang maksimal.(2) Perspektif substansi hukum, yakni analisa kebutuhan yang tidak disusun, menyebabkan beberapa Kab/Kota tidak memiliki Satuan Bhakti Pekerja Sosial, (3) Perspektif budaya hukum, yakni tidak adanya pelatihan sebelum ditugaskan ke Kab/Kota akan berdampak pada pelayanan yang kurang optimal.

Rekonstruksi Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, pasal 3, pasal 21, dan tambahan pasal 28, menghasilkan(1) Perlakuan yang adil disemua bidang kehidupan termasuk dalam perlindungan anak, maka kesejahteraan sosial akan tercapai.(2)Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, harkat dan martabat manusia yang ber keadilan sosial (3) Hukum disusun untuk digunakan bagi kepentingan umum, dalam rangka mewujudkan perlindungan hak- hak dan kewajiban warga negara

Kontruksi hukum yang diterbitkan adalah sebagai payung hukum dalam perlindungan anak. Sebagai penjabaran UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerlindunganAnak.

Kata kunci : *Rekonstruksi –Pengadaan Sakti Peksos- Berbasis Keadilan Pancasila*

ABSTRACT

Social welfare is a condition when the material, spiritual, and social needs of the citizens are fulfilled in order to develop them with the aim of performing their social duties, it is the dream of every country.

The countries which have ratified Children Right Convention are racing to ensure the best protection for children, which is the priority to be done, if they want better human resources than today. In order to actualize maximum children protection, better human resources are needed, both quality and quantity. As an effort to fulfill that need, The Social Ministry of Republic of Indonesia has been recruiting social worker since 2010 as accompaniment for Children Social Welfare Program. This Children Social Welfare Program is called “Satuan Bhakti Pekerja Sosial” (Social Worker Service Unit).

This research is intending to observe and analyze the national law construction standard for human resources of socialwelfare worker based on Pancasila,with the aim of finding the weaknesses and then reconstruct it,based on Pancasila’s Social Justice Value.

Research Methodology used in this thesis is by using legislation approach, case study, and comparing to other countries by observing and analyzing the legislation laws,journals,cases,data,distributing questionnaires and direct interview

The results of the implementation of the national law construction standard for human resources of social welfare worker that have not yet based on Pancasila are; the position of social worker as the employees of The Social Ministry of Republic of Indonesia are placed in Cities’ or Regencies’ Social Agencies, in their duties responsible to Republic Of Indonesia Social Rehabilitation Directorate. The needs analysis in the law construction has not been done yet, and recruitment is accepting applicants from different educational backgrounds without proper training before they serve the public.

The weaknesses found in the national law construction standard for human resources of social welfare worker which have not been based on Pancasila are: (1) the position of the Social Worker Service caused the range of control and management is not maximum and the Districts/cities social agencies are less responsible, (2) the needs analysis are not complied to Social Worker Service causing some Districts/cities do not have the Social Worker Service, and (3)no training given before they are assigned to the Districts/Cities will have an impact on the services provided.

The Reconstruction for the national law construction standard for human resources of social welfare worker based on Pancasila’s social justice,article3,article21,and additional article 28, produce as follows(1)fair treatment in all areas of live including child protection, social welfare will be achieved (2) The realization of improving the quality of life, dignity and dignity of people with social justice.(3) The law is structured to be used for the public interest, in orde to realize the protection of the rights and obligations of citizens

Reconstruction of the law is intended to accelerate the services to handle cases related to children and improve children protection, as a form of elaboration of Law Number35year2014,concerning about Children Protection,Social Welfare law number11Year 2009,as well as the children Criminal Justice System Act.

Keywords: Reconstruction – social worker Sakti Provision based on Pancasila’s Social Justice